

Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia

Drs. Suryana, M.Si.
Drs. Kusnendi, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul ini membahas tentang perekonomian Indonesia dilihat dari sistem karakteristik, dan strukturnya. Seperti halnya negara-negara lainnya di dunia, Indonesia memiliki sistem, karakter, dan struktur ekonomi tersendiri.

Dengan memahami sistem, ciri dan struktur perekonomian nasional, Anda akan memahami perspektif yang lebih luas bagaimana bentuk sistem perekonomian Indonesia, apa ciri-cirinya, dan bagaimana strukturnya. Jadi Anda diharapkan tidak sekadar memahami sistem perekonomian nasional secara deskriptif, tetapi juga memahami ciri-ciri struktur perekonomian secara analitik.

Setelah mempelajari materi pada modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. sistem perekonomian Indonesia;
2. ciri-ciri perekonomian beserta strukturnya

Untuk membantu Anda supaya lebih cepat memahami hal tersebut di atas, dalam modul ini akan disajikan pembahasan dan latihan dalam butir uraian sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Sistem Perekonomian Nasional

Kegiatan Belajar 2: Karakteristik dan Struktur Perekonomian Indonesia

Agar Anda berhasil menguasai modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini, sampai Anda memahami betul *apa*, *untuk apa*, dan *bagaimana* mempelajari modul ini.
2. Baca secepat bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Kemudian, cari dan baca pengertian kata-

kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus ekonomi yang ada.

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan teman mahasiswa atau tutor Anda.
4. Mantapkan pemahaman Anda secara *imaginer* (dalam pikiran) dan dalam diskusi kelompok dengan teman Anda atau dalam tutorial.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sistem Ekonomi Indonesia

A. MASALAH ORGANISASI EKONOMI

Apakah Anda ingin segera mengetahui tentang persoalan-persoalan ekonomi apa saja yang dihadapi oleh setiap kelompok masyarakat? Coba Anda simak dan perhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

Suatu kelompok masyarakat atau negara di mana saja di dunia pasti menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang mendasar yang pemecahannya tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Sepanjang barang-barang bersifat langka, mereka pasti akan dihadapkan pada 3 persoalan ekonomi, yang meliputi (1) Komoditi *apa (what)* yang harus diproduksi, dan berapa? Jawabannya tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara. Dalam sistem ekonomi liberalis, misalnya persoalan barang apa dan berapa tergantung dan diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis diatur oleh lembaga/pemerintah secara sentral. Sedangkan dalam ekonomi campuran keputusan apa yang akan diproduksi, dilakukan melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pemerintah. (2) *Bagaimana* komoditi harus diproduksi? Dengan perkataan lain, produksi ini dilakukan oleh siapa, dengan gabungan faktor-faktor produksi yang mana, serta teknik seperti apa? Siapakah yang harus bertani, dan siapa yang harus mengajar? Apakah tenaga listrik akan diperoleh dari minyak atau batu bara? Apakah kita akan memakai proses produksi yang menghasilkan banyak polusi atau sedikit polusi? Apakah proses tersebut akan dilakukan dengan cara produksi massal yang padat modul atau padat karya? Dalam bentuk perusahaan kapitalis swasta atau harus dimiliki oleh negara? Pemecahannya sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pada sistem ekonomi kapitalis bagaimana diproduksi tergantung pada permintaan pasar. Jadi mekanisme pasar yang mengatur. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, teknik produksi diatur melalui perencanaan pusat. (3) Bagi *siapa* komoditi harus diproduksi? Siapakah yang akan menikmati dan memperoleh manfaat barang dan jasa di seluruh negeri? Atau dengan kata lain, bagaimana produk nasional didistribusikan kepada setiap orang? Haruskah sedikit saja orang yang kaya dan banyak sekali yang miskin? Haruskah pendapatan yang tinggi diterima

oleh para manajer, para pekerja atau para tuan tanah? Apakah orang tamak berhak mewarisi dunia ini? Ataukah si pemalas boleh makan banyak? Dalam ekonomi pasar, tergantung pada aktivitas masing-masing faktor-faktor produksi yang harganya diatur melalui mekanisme pasar.

Walaupun 3 masalah ini sangat mendasar dan umum terjadi pada semua corak perekonomian, tetapi bagaimana cara memecahkan ketiga masalah dasar tersebut, pasti akan berbeda di setiap negara atau bangsa di dunia ini dan tergantung pada sistem ekonomi yang dianut.

Sistem perekonomian yang dipakai oleh suatu masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, baik dengan kehidupan keagamaannya, keadaan alam, tingkat teknologi yang dimiliki maupun dengan keadaan kependudukannya. Jadi, secara nyata, sistem perekonomian yang ada di dunia ini banyak ragam. Masyarakat apa pun, apakah itu di suatu negara yang benar-benar komunis, kapitalis atau sosialis bahkan satu suku tertentu di pedalaman Kalimantan, suatu negara industri yang sudah mapan atau masyarakat di negara sedang berkembang, pasti memiliki sistem perekonomian tersendiri. Untuk apa sistem itu? Coba Anda perhatikan sistem-sistem ekonomi yang ada di setiap negara.

B. PENGERTIAN SISTEM

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi yang terdiri dari berbagai subjek (atau objek) dan perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu yang mengorganisasikan macam-macam sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi dari sistem ekonomi adalah berikut ini.

1. Menyediakan perangsang untuk melakukan produksi.
2. Menyediakan cara-cara atau metode untuk mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan individu dalam perekonomian.
3. Menciptakan suatu mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan; makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan; data catatan

atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.

Kehadiran subjek-subjek (objek-objek) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem. Itu baru merupakan himpunan subjek atau himpunan objek. Himpunan subjek atau himpunan objek baru membantu sebuah sistem jika lengkap dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin bagaimana subjek-subjek yang ada bekerja, berhubungan, dan berjalan atau dijalankan. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.

Keserasian hubungan antarsubjek (antarobjek) termasuk bagian atau syarat sebuah sistem karena sebagai suatu “organisasi”, setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang akan dijadikan petunjuk apakah sistem itu dapat berjalan/dijalankan sehingga pada gilirannya kelak akan dapat dinilai apakah tujuan yang diinginkan oleh sistem itu akan tercapai atau tidak. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan kaidah atau norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek (objek-objek) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain.

Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarorang. Contohnya, aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan, peraturan-peraturan dalam suatu sistem politik atau pemerintah. Kaidah itu juga bisa berupa ketentuan-ketentuan teknis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarkomponen sebuah alat atau perlengkapan. Misalnya, spesifikasi teknis untuk suatu sistem mesin uap, tata letak mesin-mesin dalam sistem “ban berjalan” pada kegiatan produksi di sebuah pabrik. Norma tadi bisa pula berupa ketentuan-ketentuan administratif. Umpamanya syarat penerimaan dan promosi dalam sistem kepegawaian, standar prestasi dalam sistem penggajian.

Sebuah sistem, sesederhana apa pun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekadar himpunan suatu subjek (misalnya kumpulan orang atau masyarakat, kumpulan karyawan atau serikat buruh) atau himpunan suatu objek (kumpulan tanaman bunga atau taman, kumpulan dokumen atau arsip). Sebuah sistem juga bukan sekadar himpunan kaidah atau norma (misalnya kitab undang-undang hukum perdata, kumpulan peraturan kepegawaian). Bukan pula sekadar kumpulan lembaga/badan/organisasi (misalnya asosiasi

eksportir produk-produk tekstil atau Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.

Setiap sistem jika diuraikan lebih terperinci pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilih menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya setiap sistem pada hakikatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar ke mana ia (bersama dengan beberapa sistem lain) menginduk. Selanjutnya perlu disadari sering kali suatu sistem tidak (tidak bisa) berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem lain. Pola keterkaitan antar sistem sangat bervariasi. Bisa karena subjek atau objek yang membentuk kedua sistem itu sama. Bisa karena lembaga atau wadah di mana kedua sistem itu terbentuk sama. Bisa pula karena kaidah untuk sistem yang satu juga berlaku sebagai kaidah di dalam sistem yang lain.

Kesadaran bahwa sistem-sistem dapat dan bahkan sering berkaitan, itu perlu. Kesadaran demikian, dapat menghindarkan kita dari perangkat kepicikan, yakni memandang suatu secara tegar hanya berdasarkan tinjauan sempit sebuah bidang. Sebaliknya, kesadaran demikian akan memperluas wawasan kita, yakni memandang sesuatu secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang. Sebagaimana terungkap di halaman-halaman berikut nanti, sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia terkait dengan sistem-sistem lain dalam sebuah suprasistem kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagaimana perekonomian sebuah negeri berjalan atau dijalankan, turut dipengaruhi oleh bagaimana budaya masyarakat yang membentuk bangsa tersebut.

Bertolak dari pemahaman dasar mengenai makna dan hakikat sistem tadi, dengan segala kompleksitas dan keterkaitannya, kini marilah kita membantu sistem-sistem ekonomi yang ada.

C. SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal), cara kerja, mekanisme hubungan,

hubungan dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis) yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berada. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanannya atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara terjadi benturan, konflik atau bahkan tantangan. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di suatu negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi erat berkaitan dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Dilihat dari pandangan kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Dalam pengertian sebagai sistem sosial, suatu sistem ekonomi mengandung unsur.

1. Tujuan bersama dengan segala harapan, yang melahirkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah, aturan yang melembaga, yang semuanya itu memungkinkan masyarakat melakukan usaha bersama, menata dan menertibkan setiap kegiatan individu dan kelompok, dalam rangka ikhtiar mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.
2. Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut dan menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu.
3. Sikap dasar dan pengertian tentang hal dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok, satu terhadap yang lain.
4. Otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarahkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif bagi alat-alat

yang digunakan, dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mempergunakan alat-alat tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengertian sistem ekonomi menunjukkan suatu kumpulan tujuan, gagasan, kegiatan yang dipersatukan oleh beberapa bentuk saling hubungan atau ketergantungan yang merencanakan, mengatur dan mengendalikan tindakan-tindakan ekonomi masyarakat.

Dilihat dari sejarahnya, sistem ekonomi di dunia ini mengenal beberapa bentuk. Klasifikasinya tergantung pada bagaimana sistem itu membuat keputusan-keputusan dasar tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Atas dasar pandangan itu, kita dapat menemui tiga bentuk sistem ekonomi, yaitu berikut ini.

1. *Kapitalisme*, dalam sistem ini pengambilan keputusan didistribusikan secara luas atau lebih tepat diserahkan kepada semua individu. Istilah “kapitalisme” diperkenalkan oleh Karl Marx (1818–1883) untuk menunjuk pengaturan ekonomi yang menggantikan sistem feodal pada zaman Pertengahan. Sistem ini tumbuh pada era di mana banyak terjadi perubahan dalam metode produksi pada abad XVIII, dan memperoleh bentuk yang sangat tajam melalui pemikiran-pemikiran di mana alat-alat dasar produksi (tanah, tenaga kerja, kapital) dikuasai oleh swasta maka produksi barang dan jasa secara maksimal akan tercapai bila campur tangan pemerintah ditiadakan atau dibatasi sesedikit mungkin, untuk memberi kesempatan kepada setiap individu menggunakan kekayaan atau tenaga kerja sebebaskan-bebasnya untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Perekonomian yang diatur demikian ini biasa disebut perekonomian liberal atau *laissez faire*. Oleh karena itu, istilah “kapitalisme”, “liberal” atau *laissez faire* biasanya dianggap serangkaian.
2. *Sosialisme*, dalam sistem ini pengambilan keputusan terkonsentrasi pada kelompok yang berkuasa. Tapi istilah “sosialisme” juga dipergunakan dalam berbagai arti untuk menyebut cita-cita, ajaran gerakan, yang umumnya menghendaki pemilikan akan produksi secara kolektif. Sosialisme dikenal mempunyai bentuk yang bervariasi, dari yang lunak hingga yang ekstrem. Oleh karena itu pengaturan ekonomi yang dihasilkannya, yaitu kolektivisme, juga bervariasi. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem ialah komunisme dengan ekonomi berencana yang disusun, dilaksanakan, dan dikontrol oleh kekuasaan pusat.

3. Sistem Tradisional, dalam sistem ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian besar mempunyai kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Kontrol ini mungkin berada pada suku desa atau unit-unit kecil yang membagi sumber daya atau hasilnya kepada individu dan keluarga. Meskipun demikian, memang benar bahwa terdapat bentuk-bentuk sistem ekonomi, yang tidak sepenuhnya mengacu pada sistem liberalitas dan kolektivitas. Perekonomian yang diatur demikian biasa disebut sebagai sistem ekonomi campuran yang umumnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari sistem tradisional.

Penjelasan

1. Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

Ciri-ciri terpenting sistem ekonomi kapitalis liberal adalah berikut ini.

- a. Alat produksi dimiliki oleh individu atau kelompok individu atau badan hukum. Hak milik perseorangan bersifat individualistik dan pemilikan yang demikian inilah yang diidentifikasi dengan “kapitalisme”.
- b. Produksi dilakukan oleh swasta berdasarkan kebebasan individu untuk menentukan usahanya sendiri dan kebebasan memilih pekerjaannya sendiri atas inisiatif dan tanggung jawabnya sendiri, kebebasan membuat kontrak (jual-beli, sewa, pinjaman, perubahan), dan kebebasan hak milik. Kebebasan berusaha ini dianggap sebagai ciri penting. Oleh karena itu, sistem perekonomian liberal sering disebut sistem *free enterprise*. Dan selanjutnya *free trade* (perdagangan bebas).
- c. Motif laba sebesar-besarnya merupakan dasar penentuan jenis dan jumlah barang yang diproduksi
- d. Pasar ditandai oleh persaingan bebas, di mana harga barang dibentuk oleh interaksi bebas antara penawaran dan permintaan atau dengan kata lain antara persediaan dan kebebasan konsumsi.
- e. Pada dasarnya negara tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Tugas utama negara ialah menjaga tertib hukum yang menjamin kebebasan usaha setiap individu atau dengan kata lain, melaksanakan *doktrin liaises faire laissez passer*.

Sepanjang kenyataan sejarah, sistem kapitalis liberal *free enterprise* atau *lassies faire* ini mampu mengembangkan perekonomian industrial yang hebat, tapi juga disertai ketidakadilan sosial yang amat parah.

2. Sistem Ekonomi Sosialisme/Kolektivisme

Sistem ini berdasarkan atas anggapan bahwa kekuatan dan kekuasaan dapat membangun segala-galanya dan manusia dapat dimanipulasi tujuan-tujuan yang menurut kepercayaan falsafah yang mendasarinya niscaya tercapai, yaitu masyarakat sosialis murni, tetapi dalam praktiknya dipaksakan. Pencapaian kemakmuran diusahakan melalui kekuatan dan kekuasaan negara, demikian juga alokasi semua barang pemuas kebutuhan ekonomi.

Ciri-ciri terpentingnya perekonomian kolektif ialah berikut ini.

- a. Alat produksi dan sumber ekonomi dikuasai seluruhnya oleh negara. Semua kekayaan adalah kekayaan sosial. Hak milik perseorangan atas alat produksi dan sumber ekonomi tak diakui. Tanah misalnya, dimiliki secara kolektif. Pemilikan seperti ini disebut kolektivisme.
- b. Seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang-barang, merupakan usaha bersama di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah negara. Usaha swasta tak dikenal, semua perusahaan adalah perusahaan negara. Pendek kata, kegiatan ekonomi adalah serba negara (*etatisme*), semua warga masyarakat adalah pekerja yang dibebani kewajiban turut serta dalam kegiatan ekonomi menurut kemampuan, dan setiap warga dijamin keperluan hidupnya menurut kebutuhan.
- c. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan menurut rencana pemerintah pusat atau badan pusat yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem ini disebut sistem perekonomian berencana (*central planning*).
- d. Sifat serba negara, di samping menyangkut produksi dan distribusi barang, juga mencakup pengaturan konsumsi dan penentuan harga barang menurut rencana dan penetapan pemerintah. Jadi, pertukaran pun tak ada, kecuali pertukaran barang-barang yang sudah dibagikan.
- e. Negara adalah penguasa mutlak. Oleh karena tidak ada milik perseorangan, kecuali atas barang-barang yang dihasilkan dengan tenaga kerjanya sendiri, tidak ada kebebasan perusahaan dan memilih pekerjaan maka sistem ini sebenarnya lebih tepat disebut sistem perekonomian *totaliter*.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Dalam sistem ini, kekuasaan dan kebebasan berdampingan dalam kadar yang berbeda-beda, dan inilah yang menimbulkan berbagai bentuk campuran. Ada campuran yang lebih mendekati sistem liberalistis karena kadar kebebasan yang relatif besar. Ada pula campuran yang lebih mendekati sistem kolektivitas karena peranan kekuasaan pemerintah negara yang relatif besar dalam proses ekonomi.

Tapi dalam berbagai bentuk campuran ini, sumber ekonomi bangsa, termasuk alat produksi, dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber-sumber tertentu yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Oleh karena itu, dalam sistem campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yakni *Sektor Swasta dan Sektor Negara* (Sektor Pemerintah, Sektor Publik).

Sedang di Indonesia, menurut Pasal 33 UUD 1945 di samping dua sektor tersebut dikenal pula *Sektor Koperasi*, yang bahkan karena posisinya yang strategis dan asasi dalam kerangka sistem perekonomian berdasarkan UUD 1945 sebagai jabaran Pancasila, dianggap sebagai sentral sistem. Dalam buku ini Sektor Swasta dan Sektor Koperasi bersama-sama kita sebut Sektor Bebas.

Sistem campuran melahirkan *ekonomi pasaran sosial*, yang memungkinkan terjadinya persaingan di pasar bebas, tetapi bukan persaingan mati-matian. Sedangkan campur tangan pemerintah dilancarkan untuk menyetatkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi krisis-krisis, dan membantu golongan ekonomi lemah.

Bentuk sistem campuran juga sering menggunakan nama sosialis atau sosialisme, tetapi bukan sosialis atau sosialisme ekstrem (radikal); seperti misalnya komunisme yang menempatkan individu di bawah subordinasi kelas, dan fasisme yang meletakkan individu di bawah subordinasi negara (jadi komunisme itu sebenarnya fasisme juga, yaitu fasisme merah). Jadi, negara-negara komunis menyebut dirinya sosialis, sementara negara yang menolak komunisme juga menyebut dirinya demikian. Hitler mengambil nama “nasional sosialisme” bagi gerakannya, tetapi negara-negara non-komunis dan non-fasis, menyebut dirinya sendiri sosialisme yang diperlunak. Nama lain yang identik dengan ekonomi campuran ialah negara kemakmuran, negara kesejahteraan, demokrasi ekonomi, serta masyarakat adil makmur.

D. SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dari paparan di atas, kita kembali pada pertanyaan tentang sistem ekonomi apa yang berlangsung atau diterapkan di tanah air. Sebagaimana telah disinggung di atas, pertanyaan yang sederhana ini tidak mudah untuk dijawab. Langkah terbaik untuk menuju jawabannya adalah dengan menelaah keadaan dan perkembangan perekonomian kita berdasarkan butir-butir sudut tinjauan tadi berdasarkan hukum, perilaku, norma dan etika yang berlaku atau dianut oleh masyarakat dalam berekonomi, serta berdasarkan tinjauan pengalaman kronologis.

Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antar individu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi (misalnya) pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/ keahlian yang diminatinya. Pemerintah juga membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jenuh pasar tenaga kerjanya. Untuk itu, pemerintah turut mengatur penyediaan bidang pendidikan/keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Jadi, tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekadar menyediakan anggaran atau subsidi dana pendidikan, sebagaimana yang pada umumnya berlangsung di negara kapitalis.

Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun, untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pengendalian dimaksud, misalnya dengan mengumumkan *Daftar Negatif Investasi* (DNI).

Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidak terdapat kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerjaan/permodalan untuk

mendapatkan imbalan melebihi sekadar kebutuhannya. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.

Iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat sehingga persaingan praktis terkendali atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi dalam beberapa hal terkendali.

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional untuk kehidupan ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945, antara lain tercantum dalam Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting UUD 1945 dalam hubungannya dengan perekonomian Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) UUD menetapkan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, sedang Pasal 34 menetapkan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”*. Pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasannya yang otentik berbunyi seperti berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokratis ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa dan

rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan perorangan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme, tetapi merupakan sistem ekonomi campuran atau sering disebut juga sebagai *sistem ekonomi Pancasila*.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tiga persoalan dasar setiap organisasi ekonomi!
- 2) Bagaimanakah ketiga persoalan dasar tersebut dipecahkan?
- 3) Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu? Jelaskan!
- 4) Jelaskan perbedaan utama antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran!
- 5) Menurut Anda, sistem ekonomi yang bagaimana yang dianut oleh Indonesia? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- a. Untuk soal latihan Nomor (1), (2) dan (3) perhatikan uraian tentang persoalan dasar dan sistem ekonomi.
- b. Untuk soal latihan Nomor (4) pusatkan perhatian Anda pada uraian tentang 3 sistem ekonomi.
- c. Jawaban soal latihan Nomor (5) ada pada uraian tentang sistem ekonomi Indonesia.



RANGKUMAN

Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki 3 persoalan dasar, organisasi ekonomi yang sama, yaitu barang apa, bagaimana dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pemecahan terhadap ketiga persoalan dasar tersebut dilakukan oleh setiap negara atau bangsa dengan cara yang berbeda, tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya.

Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebagai bagian dari sistem sosial, sistem ekonomi mengandung unsur-unsur tujuan, nilai-nilai, sikap dasar, otoritas kepemimpinan, dan struktur kekuasaan.

Dilihat dari perkembangannya, sistem ekonomi di dunia dapat dibedakan menjadi sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran. Indonesia dilihat dari dasar konstitusionalnya, menganut sistem ekonomi campuran. Pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945 merupakan pasal-pasal terpenting dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Indonesia.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Setiap negara di dunia ini memiliki persoalan dasar organisasi ekonomi yang sama yang meliputi, *kecuali*
 - A. bagaimana cara memproduksinya
 - B. komoditi apa yang harus diproduksi
 - C. diperuntukkan bagi negara kapitalisme
 - D. komoditi yang sudah diproduksi, diperuntukkan bagi siapa?

- 2) Fungsi sistem ekonomi dalam suatu masyarakat, yaitu
 - A. mengatur dan menjalankan subjek-subjek yang ada untuk bekerja
 - B. untuk mencapai kombinasi dari subjek-objek tersebut
 - C. menyediakan perangsang untuk melakukan produksi
 - D. menjalin hubungan satu sama lain

- 3) Sebagai suatu sistem sosialis, sistem ekonomi mengandung unsur
 - A. produksi dijalankan melalui mekanisme pasar
 - B. teknik produksi diatur melalui perencanaan pusat
 - C. mempunyai hubungan erat dengan kehidupan keagamaan
 - D. masing-masing faktor produksi dan harga, diatur oleh mekanisme pasar

- 4) Sistem ekonomi kapitalis memperoleh produksinya tergantung pada permintaan
 - A. antarnegara
 - B. perencanaan pusat
 - C. mekanisme masyarakat
 - D. pasar

- 5) Unsur-unsur yang ada dalam sistem ekonomi terdiri atas beberapa hal, *kecuali*
 - A. barang ekonomi sebagai objek
 - B. unsur manusia sebagai subjek
 - C. perangkat kelembagaan yang mengatur
 - D. mendapat dukungan perilaku dan etika masyarakat

- 6) Sistem ekonomi kapitalis dilihat dari sejarahnya, pengambilan keputusan diserahkan pada
 - A. pemerintah
 - B. masyarakat
 - C. kelompok
 - D. individu

- 7) Sosialisme dikenal mempunyai bentuk yang bervariasi lunak dan ekstrem, pengaturan ekonomi yang dihasilkan, yaitu
 - A. kolektivisme
 - B. serangkai
 - C. menurut pola tradisi
 - D. industrial

- 8) Hal-hal yang terpenting dalam perekonomian kolektif, yaitu
 - A. sumber ekonomi dimiliki oleh masyarakat
 - B. dalam kehidupan ekonomi mendapat campur tangan pemerintah
 - C. jenis dan jumlah barang diproduksi ditetapkan oleh pemerintah
 - D. penentuan harga berdasarkan kebebasan konsumsi

- 9) Indonesia menganut sistem ekonomi apa?
 - A. Sosialistik.
 - B. Kapitalistik.
 - C. Liberalistik.
 - D. Pancasila.

- 10) Landasan konstitusional sistem ekonomi Indonesia termaktub dalam Pasal
- A. 20 UUD 1945
 - B. 33 UUD 1945
 - C. 34 UUD 1945
 - D. 25 UUD 1945

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Karakteristik dan Struktur Perekonomian Indonesia

Bila kita berbicara tentang karakteristik perekonomian suatu negara maka tidak bisa lepas dari pembahasan tentang struktur perekonomian negara tersebut. Untuk membedakannya, marilah kita bahas satu per satu sehingga jelas persamaan dan perbedaannya.

A. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

Karakteristik perekonomian Indonesia tidak berbeda dengan karakteristik perekonomian negara-negara berkembang lainnya. Meiyer dan Baldwin, dalam bukunya *Economic Development Theory. History and Policy* mengemukakan beberapa ciri negara sedang berkembang, yaitu berikut ini.

1. Penghasilan bahan-bahan primer (bahan baku primer).
2. Mengalami tekanan penduduk yang tinggi.
3. Memiliki sumber daya alam yang belum dikembangkan.
4. Penduduk yang terbelakang secara ekonomi.
5. Kekurangan modal.
6. Orientasi pada perdagangan luar negeri.

Ciri-ciri struktur ekonomi di atas tidak berbeda dengan Indonesia.

1. Penghasilan Bahan Primer

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang banyak mengandalkan sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan hanya sebagian kecil saja penduduk yang bekerja pada sektor sekunder (*manufacture*) dan tersier (jasa). Penduduk pada negara-negara sedang berkembang yang bekerja di sektor primer pada umumnya kurang lebih 60%, di sektor produksi sekunder kurang dari 20%, dan sektor tersier kurang dari 20%. Jika dilihat dari hasil produksinya, Indonesia lebih banyak menghasilkan barang-barang primer (pertanian) dibandingkan dengan barang-barang sekunder (manufaktur). Komposisi ekspor dunia tahun 1980

menunjukkan bahwa ekspor yang berasal dari negara berkembang 79% merupakan komoditi primer, dan 21% merupakan barang-barang manufaktur (Todaro, 1987). Ciri lain yang sejalan dengan karakteristik itu adalah bahwa pada tahap awal pembangunan, sektor pertanian menyumbang 40% sampai 60% pada PDB dan sektor manufaktur menyumbang 20% sehingga 30% (Sumawinata, 1989).

Setelah Anda mengetahui ilustrasi karakteristik perekonomian di atas, sekarang perhatikan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Sejak Pembangunan Jangka Panjang tahap I (PJP I), di Indonesia terjadi ketidakserasian perkembangan antarsektor ekonomi, khususnya antara sektor primer versus sektor sekunder. PJP I sudah berakhir dan telah menghasilkan keberhasilan dan ketidakberhasilan. Indikator keberhasilan, terutama selama Pelita I sampai dengan Pelita IV, secara kuantitatif dinyatakan dalam bentuk kebutuhan pokok material fisik, seperti sandang dan pangan sampai awal akhir PJP I sudah terpenuhi. Kualitas hidup manusia Indonesia mulai tahun 1980 meningkat, seperti tercermin dalam indeks yang merangkum usia harapan hidup. Indeks ini secara nasional meningkat dari 51 tahun pada tahun 1971 menjadi 59 pada tahun 1980. Hasil ini dicapai berkat pembangunan ekonomi, terutama pada peningkatan produksi di sektor primer. Sementara itu, produksi di sektor sekunder, industri manufaktur yang mengolah bahan baku, dan sektor tersier (jasa) telah tumbuh (Emil Salim, 1987). Posisi peran sektor sekunder secara kuantitatif telah menggeser sektor primer walaupun sektor ini khususnya pertanian, tetap merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian. Sebagai ilustrasi, perhatikan angka-angka statistik pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
menurut Lapangan Usaha (dalam %)

Tahun	Sektor Primer	Sektor Sekunder
1987	2,41	10,61
1988	4,90	12,19
1989	3,92	9,20
1990	2,00	12,19
1991	1,34	9,81

Sumber: BPS diolah oleh Kumala Hadi, et.al.

Berdasarkan data 1987 – 1991 tersebut, pertumbuhan sektor industri manufaktur rata-rata 10% per tahun, sedangkan pertumbuhan sektor primer rata-rata 2%. Dilihat dari sumbangannya terhadap PDB, sektor pertanian menyumbang sekitar 19,6%, sedangkan sektor industri manufaktur menyumbang 19,3%.

Tabel 1.2.
Distribusi Persentase PDB Berdasarkan Harga Konstan 1983 (dalam %)

Tahun	Sektor Pertanian *)	Sektor Industri **)
1975	26,46	8,86
1980	23,27	12,60
1985	22,68	15,79
1989	20,46	18,19
1990	19,58	19,30
1991	18,50	19,90

Sumber: BPS diolah oleh Kumala Hadi, et.al.

* Termasuk peternakan, kehutanan, perikanan

** Industri manufaktur

Perubahan mendasar terjadi pada tahun 1991, di mana sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB sebesar 19,9% untuk pertama kalinya telah melebihi sektor pertanian 18,5%. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 1975-1990, peran sektor primer terhadap PDB semakin menurun dari 26,5% tahun 1975 menjadi 19,6% pada tahun 1990. sedangkan peran sektor sekunder meningkat dari 8,9% tahun 1975 menjadi 19,3% tahun 1990.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980-an sektor pertanian telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga berperan dalam menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan sektor pertanian dan upaya peningkatan ekspor dari pertanian maka peningkatan pengembangan industri ringan terutama yang mengolah hasil pertanian sangat perlu diperhatikan. Untuk mendukung pengembangan sektor pertanian (subsistem) yang seimbang dengan perekonomian kota (manufaktur), perlu adanya industri manufaktur dengan teknologi yang relevan (teknologi tepat guna).

2. Angka Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2004 diperkirakan 200 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan angka

pengangguran dan beban tanggungan yang tinggi. Angka beban tanggungan yang tinggi terlihat dari pendapatan per kapita yang rendah. Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak penduduknya dan paling kecil pendapatan per kapitanya. Tahun 2004 pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan \$575 UD. Hal ini disebabkan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu diikuti oleh pertumbuhan penduduk sehingga tingkat kesejahteraan tidak meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang secara ekonomi masih terbelakang mencerminkan rendahnya kualitas penduduk sebagai tenaga kerja (*labor*). Pada umumnya penduduk demikian, merupakan faktor produksi yang kurang efisien dan kurang mobil (kurang perputaran) dalam pekerjaan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena kualitas penduduknya yang rendah maka banyak sumber daya alam yang belum dapat dikembangkan. Sumber daya alam yang belum dapat dikembangkan tersebut sebagai akibat kekurangan modal dan keterampilan. Sebagai contoh, banyak sumber daya alam Indonesia yang belum dikelola oleh pihak asing dengan keuntungan bagi hasil.

Manifestasi lain dari angka pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah tekanan penduduk yang memiliki tiga bentuk pokok, yaitu:

- a. tingkat kelahiran yang tinggi;
- b. tingkat kematian yang mulai menurun;
- c. pembangunan pedesaan (*rural development*)

Sebagai akibat jumlah tenaga kerja yang semakin lama semakin meningkat, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin terbatas maka penggunaan tenaga kerja menjadi kurang efisien dan efektif. Sebagai implikasinya timbullah 2 jenis pengangguran.

- a. pengangguran semu atau terselubung (*disguised unemployment*), yaitu orang-orang di pedesaan dan di perkotaan bekerja kurang dari semestinya, misalnya harian, mingguan atau musiman sehingga seolah-olah memiliki pekerjaan, tetapi tidak penuh waktu bekerja atau *full time*, tetapi produktivitasnya rendah.
- b. Pengangguran terbuka, yaitu keadaan di mana orang-orang yang sebenarnya ingin dan suka bekerja, tetapi tidak tersedia pekerjaan. Banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena tidak tersedianya pekerjaan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk satu negara adalah pengangguran. Jika kita menggunakan definisi minimum 35 jam kerja per minggu maka tingkat pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) masih sangat tinggi, yaitu 35%. Hal ini terlihat dari persentase angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sekitar 36% tahun 1980, yang meningkat menjadi 38,3% tahun 1985 dan 36,6% pada tahun 1990. Dengan tingkat pengangguran terselubung tersebut di atas maka tingkat upah dan tingkat kesejahteraan pekerja sukar untuk ditingkatkan.

3. Sumber Daya Alam yang Masih Potensial

Sumber daya alam potensial adalah sumber daya alam yang belum dikembangkan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan dan kehutanan. Sumber daya alam yang belum dikembangkan sebagai akibat dari tidak memiliki jumlah modal dan tenaga terampil yang cukup, menyebabkan produktivitasnya sangat rendah. Oleh karena produktivitas rendah maka pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan pembentukan modal juga rendah yang berarti sumber daya alam tidak bisa dikembangkan secara optimal.

Untuk mengembangkan sumber daya alam, negara-negara sedang berkembang pada umumnya menarik investor asing. Akan tetapi, penanaman modal asing tersebut adakalanya tidak selalu menguntungkan karena sering kali penanaman modal tersebut berkiblat kepada negara induk pemilik modal dan merupakan *in clove industry*. Selain sebagian hasilnya dibawa ke luar dan dipergunakan untuk keperluan bahan baku industri mereka, juga tidak jarang menggunakan pola investasi negara mereka sehingga baik tenaga kerja maupun mesin didatangkan dari negara induk. Sebagai contoh, industri pertambangan emas Busang, Free Port, dan Caltex.

4. Kurangnya Permodalan

Kekurangan modal dapat dilihat dari 3 sudut, yaitu:

- a. kecilnya jumlah mutlak kapital material;
- b. terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- c. rendahnya investasi neto.

Akibat rendahnya ketiga unsur di atas maka tingkat Produk Nasional Bruto (PNB) menjadi rendah yang berarti pendapatan nasional juga rendah.

5. Orientasi Pada Perdagangan Luar Negeri

Salah satu ciri perekonomian Indonesia adalah berorientasi pada hasil ekspor pertanian. Akibat dari pentingnya ekspor dalam keseluruhan produksi maupun tingginya tingkat konsentrasi ekspor maka sebagian besar dari hasil nasional Indonesia (seperti tercermin dalam APBN), terdiri dari beberapa macam komoditi secara praktis tidak ada spesialisasi. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap ekspor produk utama, seperti minyak dan hasil pertanian, menjadikan Indonesia sangat peka terhadap tekanan-tekanan pasaran internasional. Pergeseran yang sangat luas dari persediaan komoditi pertanian sebagai akibat fluktuasi dalam siklus perdagangan dunia membawa kegoncangan-kegoncangan jangka pendek dalam penghasilan ekspor karena sumber daya kurang fleksibel maka sangatlah sulit menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan jangka panjang dalam permintaan dunia. Salah satu akibat dari kurang fleksibelnya sumber daya adalah penurunan dalam perimbangan harga-harga barang ekspor ke negara besar sehingga sulit menarik manfaat dari pasaran dunia. Perbaikan dalam *term of trade* tidak diimbangi dengan kenaikan *output* dan lapangan kerja karena pasar kurang sempurna, *social overhead* kurang memadai, dan ketidaksempurnaannya dalam menyesuaikan diri secara struktural. Setiap usaha meningkatkan produktivitas industri barang primer selalu berakhir pada kemerosotan *term of trade*, pengangguran, dan ketidakseimbangan neraca pembayaran, yang pada gilirannya akan memperendah tingkat pembentukan modal, yang berarti mempersulit tingkat pertumbuhan ekonomi. Efek akhir dari hal tersebut adalah ketergantungan terhadap kekuatan luar negeri dalam hubungan luar negeri, baik ekonomi, politik maupun kultural. Ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan luar negeri, menjadikan devisa luar negeri sebagai alat yang paling menentukan dalam perekonomian nasional. Akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa ketergantungan negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia untuk memperoleh devisa, menyebabkan karakteristik umum negara-negara sedang berkembang adalah dependensi dalam ekonomi dunia. Sebagai contoh 10% sampai dengan 15% GNP negara-negara sedang berkembang adalah hasil ekspor sektor pertanian dan bahan dasar lainnya (Todaro, 1983). Akibatnya, negara-negara yang sudah maju sering kali mengendalikan dan mendikte pola perdagangan internasional, bahkan menerapkan syarat-syarat pengiriman teknologi dan bantuan luar negeri. Oleh sebab itu, di luar manifestasi ekonomi, ketergantungan adalah dalam bentuk pengiriman barang-barang dan teknologi apakah berupa transmisi

lembaga-lembaga internasional (seperti sistem pendidikan dan kesehatan), nilai-nilai pola konsumsi, maupun sikap-sikap terhadap diri sendiri. Semua persoalan di atas pada gilirannya menimbulkan suatu situasi *vulnerabilities* (perasaan mudah terpengaruh, mudah tersinggung) oleh kekuatan-kekuatan internasional, baik sosial maupun ekonomi.

B. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Struktur ekonomi suatu negara dapat diketahui dari 2 sudut sebagai berikut.

1. Lapangan kerja dan lapangan kehidupan sebagian besar dari penduduk.
2. Besarnya sumbangan dari setiap sektor kegiatan ekonomi terhadap GDP/GNP.

Struktur perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang dinamis. Pada awal tahun 1960 sampai dengan Pelita II (1981), struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertanian, kemudian tahun 90-an sampai sekarang berubah didominasi oleh semi industri.

Pada awalnya, Indonesia termasuk negara yang memiliki struktur perekonomian agraris yang berpandangan sosial kultural baik komersial maupun subsistem. Seperti halnya di banyak negara berkembang lainnya yang lebih banyak tenaga kerja yang tertampung pada sektor pertanian (yaitu hampir mencapai 50% sampai dengan 80%) maka pada tahun 1960 penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian sekitar 75% dan menurun menjadi 60% pada tahun 1978.

Untuk melihat sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional khususnya GDP pada tahun 70-an, perhatikan Tabel 1.3

Tabel 1.3.
Sumbangan Setiap Sektor Ekonomi terhadap GDP Tahun 1971-1978 (dalam %)

Lapangan Usaha	Tahun							
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	44,0	40,8	40,1	38,7	36,8	36,1	33,6	33,1
2. Pertambangan	9,0	11,1	12,3	11,8	10,9	11,7	12,2	11,0
3. industri	8,8	9,3	9,6	10,4	11,1	11,4	11,9	12,4
4. Bangunan	3,1	3,7	3,9	4,4	4,8	4,7	5,2	5,6
5. pengangkutan &	3,8	5,2	3,8	4,0	4,0	4,2	4,8	5,2

Lapangan Usaha	Tahun							
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
6. Perdagangan, komunikasi lembaga keuangan, dan jasa	20,29	30,9	29,8	30,2	30,2	31,9	31,3	32,1

Sumber : Biro Pusat Statistik Tahun 1979

Selain dapat dilihat dari sumbangan setiap lapangan usaha terhadap GNP, struktur perekonomian Indonesia dapat dilihat dari bagian GNP yang diterima oleh penduduk Indonesia. Sebagai ilustrasi, perhatikan Tabel 1.4

Tabel 1.4
Bagian dari GNP yang Diterima oleh Penduduk Indonesia

Lapangan Usaha	40% penduduk Berpendapatan Rendah	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	20% Penduduk Berpendapatan Tinggi	Gini
1. Pertanian	11,65	29,81	28,54	0,54
2. Pertambangan dan Galian	14,56	33,56	52,08	0,46
3. Industri	15,43	34,99	49,58	0,43
4. Listrik, Gas, dan Air	19,10	38,22	42,68	0,35
5. Konstruksi	19,81	37,15	43,04	0,36
6. Perdagangan	14,90	35,15	29,12	0,44
7. Transportasi	17,51	36,06	36,43	0,39
8. Keuangan, Bank dan Asuransi	14,58	35,30	50,12	0,44
9. Jasa-jasa	6,87	32,65	60,49	0,59
10. Lainnya	14,35	35,32	50,33	0,45

Sumber: Sumitro Djojohadikusumo, Dasawarsa 1980: Prospek dan Tantangan, Tabel XII

Oleh karena struktur perekonomian Indonesia masih menitikberatkan pada sektor pertanian maka ekspornya pun menitikberatkan pada sektor primer hasil pertanian.

Melalui serangkaian Repelita maka struktur perekonomian Indonesia diharapkan berubah dari sektor pertanian menuju sektor industri yang seimbang dengan sektor pertanian menuju sektor industri yang seimbang

dengan sektor pertanian. Oleh sebab itu, baik strategi pembangunan pertanian maupun strategi pembangunan industri ditempuh bersama-sama dalam setiap tahap rencana pembangunan. Untuk memahami strategi ini, perhatikan tahapan-tahapan perubahan struktur pada sektor pertanian dan sektor industri berikut ini.

1. Perubahan Struktur Pertanian

Ada 3 jenjang analisis dalam usaha memahami ekonomi pertanian dan pembangunan pedesaan. Pertama, pertanian primitif subsistem dengan tingkat produktivitas rendah. Kedua, diversifikasi (penganekaragaman) atau pertanian campuran yang sebagian hasilnya untuk dimakan sendiri dan sebagian dijual ke sektor komersial. Ketiga, pertanian, spesialisasi (modern) yang seluruh hasil produknya untuk melayani keperluan dasar.

Dalam pertanian subsistem tradisional, pada umumnya menghasilkan output yang sama dengan konsumsi, produktivitas rendah, modal kecil teknologi terbatas, kelembagaan yang kaku, pasar-pasar terpisah jauh, jaringan komunikasi antar daerah pedesaan dan perkotaan, cenderung menghambat tingkat produksi dan semata-mata hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setelah jenjang pertanian tersebut dilalui, baru masuk jenjang pertanian transisi menuju pertanian campuran dan diverifikasi. Dalam tahapan ini, tanaman pokok tidak lagi mendominasi hasil pertanian karena sudah ada tanaman sampingan atau selingan yang baru, bersama-sama dengan usaha ternak, Jenjang terakhir adalah pertanian spesialisasi. Keuntungan komersial menjadi kriteria keberhasilan dengan cara meningkatkan hasil maksimum setiap hektar melalui usaha-usaha lain pancausaha, seperti pengolahan, irigasi, pemilihan bibit unggul, pemupukan, dan pemberantasan hama/penyakit tanaman. Seluruh produksi diarahkan untuk keperluan pasar. Usaha pertanian ini cenderung bersifat agrobisnis. Konsep-konsep ekonomi, seperti biaya tetap, biaya variabel, tabungan, investasi dan jumlah keuntungan menjadi unsur penting dalam pertanian dan pedesaan perlu adanya persyaratan perubahan teknik produksi, kebijaksanaan ekonomi pemerintah, lembaga sosial yang menunjang, modernisasi struktur pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, sistem penunjang yang efektif, dan keadaan lingkungan pedesaan yang memungkinkan untuk meningkatkan tingkat hidup.

Selain persyaratan di atas, untuk membangun dan mentransformasikan pertanian subsistem menjadi pertanian modern, ada beberapa syarat pokok dan mutlak yang harus dipenuhi, yakni:

1. pemasaran hasil-hasil usaha tani;
2. teknologi yang selalu berubah;
3. tersedianya sarana produksi dan sarana lokal;
4. adanya perangsang produksi bagi petani;
5. adanya sarana transportasi (pengangkutan)

2. Perubahan Struktur Industri dan Jasa

Dalam kepentingan yang sangat relatif, perubahan sektor industri dan jasa banyak variasinya, tergantung pada interdependensi antarsektor-sektor industri yang pertama (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan), dan kedua (sektor perindustrian secara umum), serta yang ketiga (sektor perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa). Pada umumnya negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, memandang sektor industri sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini berdasarkan pada pengamatan empiris bahwa negara-negara yang telah maju dan kaya ternyata lebih banyak menekankan pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari sumbangan sektor industri di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang berkisar antara 20% hingga 30% terhadap GNP. Demikian juga, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tidak lebih dari 20% dari seluruh tenaga kerja. Akan tetapi rasa percaya terhadap mistik industrialisasi bagi Indonesia sejak Pelita I sudah dipertimbangkan sebagai upaya strategi pembangunan jangka panjang. Hal ini dapat Anda perhatikan dalam tahapan Repelita yang telah dilalui pada PJP berikut ini.

- Repelita I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian
- Repelita II : Menitikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- Repelita III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi
- Repelita IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin

industri, baik industri berat maupun industri ringan, yang terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya.

Dari gambaran strategi pembangunan pada setiap tahapan Repelita tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia menuju perubahan struktur ekonomi yang sangat menakjubkan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata tahunan beberapa sektor terhadap PDB. Kontribusi sektor pertanian sejak Repelita I sampai dengan sekarang ini meningkat paling kecil terhadap PDB. Justru sektor industri pengolahan, bangunan dan telekomunikasi masing-masing tumbuh di atas sektor pertanian. Pada Repelita VI tahun ke-5, sektor industri pengolahan tumbuh 9,7%, sektor bangunan 8,4%, sektor transportasi dan komunikasi 8,4% dan sektor perdagangan 7%, sedangkan sektor pertanian dan pertambangan masing-masing hanya tumbuh 3,5% dan 2,5%.

Tabel 1.5.
Pertumbuhan Rata-rata Tahunan Beberapa Sektor
Terhadap PDB Indonesia Repelita I - Repelita IV

Sektor	Repelita I - V					Repelita VI tahun ke					Repelita VI
	I	II	III	IV	V	1	2	3	4	5	
Pertanian	4,5	3,0	4,2	3,6	2,4	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4
Pertambangan	14,10	4,3	0,4	0,3	5,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6
Industri Pengolahan	13,7	13,1	13,9	10,4	10,0	9,4	8,9	8,9	10,5	9,7	9,4
Bangunan	22,9	12,1	6,7	6,1	11,7	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,0
Transportasi dan Komunikasi	13,0	14,5	6,4	5,0	9,0	7,0	7,4	7,7	8,0	8,4	7,7
Perdagangan	9,2	8,3	7,7	6,2	7,1	6,3	6,5	6,7	6,7	7,0	6,7

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN RI diolah oleh Dumairy, 1996.

Dengan memperhatikan angka statistik pada Tabel 1.5 terlihat bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup fundamental.

Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah perkiraan perubahan struktur ekonomi Indonesia sejak Repelita I (Tabel 5.1) Struktur perekonomian tahun 1999-2003 Tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6.
Perkiraan Struktur Ekonomi Indonesia

Sektor	Realisasi			Proyeksi	
	1999	2000	2001	2002	2003
Pertumbuhan PDB (%)					
Pertanian	2,2	1,7	0,6	3,2	1,7
Industri Pengolahan	3,9	6,1	4,3	3,7	5,8
Non-migas	3,5	7,2	5,2	4,2	6,4
Lainnya	-1,0	5,3	3,6	3,5	3,8
Distribusi PDB					
Pertanian	19,6	17,0	16,4	16,8	16,8
Industri Pengolahan	26,0	26,2	26,1	26,0	26,1
Non-migas	22,8	22,0	22,0	21,9	22,2
Lainnya	54,4	56,8	57,2	57,2	57,1
Tenaga Kerja					
Kesempatan Kerja (1 juta orang)	88,8	89,8	90,8	92,0	93,4
Pengangguran Terbuka (%)	6,4	6,1	8,1	8,9	9,4

Sumber: Perekonomian Indonesia tahun 2003 Prospek dan Kebijakan. hal III-12



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda jelaskan ciri-ciri utama perekonomian Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara berkembang lainnya!
- 2) Mengapa perekonomian yang menghasilkan bahan primer cenderung memiliki *term of trade* yang rendah?
- 3) Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi, coba Anda jelaskan!
- 4) Apabila Anda perhatikan, struktur perekonomian Indonesia, mengapa Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris dan mengapa juga dikategorikan sebagai negara semiindustri?
- 5) Bagaimana proses terjadinya perubahan struktur ekonomi berdasarkan kajian Anda?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Diskusikan dengan teman dan tutor Anda, kemudian Anda simak ciri-ciri umum perekonomian negara-negara sedang berkembang
- 2) Bacalah uraian materinya di depan.
- 3) Anda simak kembali uraian materi ini dan cari literatur lain yang relevan.
- 4) Anda simak tabel-tabel pertumbuhan sektoral terhadap PDB dan jumlah tenaga kerja terserap untuk masing-masing sektor yang disajikan pada Kegiatan Belajar 2
- 5) Diskusikan dengan teman Anda, setelah Anda menyimak halaman 1.18



RANGKUMAN

1. Karakteristik perekonomian Indonesia, tidak berbeda dengan karakteristik, negara-negara berkembang lainnya, yaitu:
 - a. penghasil bahan-bahan primer (bahan baku primer);
 - b. mengalami tekanan penduduk yang tinggi;
 - c. memiliki sumber daya alam yang belum dikembangkan;
 - d. penduduk yang terbelakang secara ekonomi;
 - e. kekurangan modal;
 - f. orientasi pada perdagangan luar negeri.
2. Ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang primer, mengakibatkan Indonesia selalu memiliki posisi yang lemah dalam menentukan *term of trade*.
3. Akibat jumlah tenaga kerja semakin lama semakin banyak, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin terbatas maka penggunaan tenaga kerja kurang efisien dan efektif. Akibatnya timbul pengangguran semu dan pengangguran terbuka.
4. Sumber daya alam yang belum dikembangkan sebagai akibat dari tidak dimiliki juga jumlah modal dan tenaga terampil yang cukup, menyebabkan produktivitas sangat rendah. Oleh karena produktivitas rendah maka pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan pembentukan modal juga rendah, yang berarti sumber daya alam tidak bisa dikembangkan secara optimal.
5. Struktur ekonomi suatu negara dapat diketahui dari lapangan kerja dan lapangan kehidupan sebagian besar dari penduduknya, serta besarnya sumbangan setiap sektor kegiatan ekonomi terhadap GNP/GDP.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu ciri perekonomian Indonesia yang paling menonjol adalah perekonomian yang berstruktur
 - A. agraris
 - B. industri
 - C. jasa
 - D. semuanya benar

- 2) Berikut ini termasuk sektor tersier, *kecuali* sektor....
 - A. pendidikan
 - B. industri
 - C. asuransi
 - D. perbankan

- 3) Jenis pengangguran yang bukan merupakan ciri negara sedang berkembang adalah pengangguran.....
 - A. terpaksa
 - B. sementara
 - C. terbuka
 - D. tak kentara

- 4) Apabila tingkat kesejahteraan ingin meningkat maka
 - A. tingkat pertumbuhan ekonomi harus sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk
 - B. tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk.
 - C. tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi
 - D. mortalitas harus lebih besar daripada fertilitas

- 5) Kekurangan modal sebagai salah satu karakteristik perekonomian nasional tercermin dalam
 - A. besarnya utang luar negeri
 - B. kecilnya daya serap tenaga kerja
 - C. terbatasnya kapasitas penduduk
 - D. kecilnya tabungan yang dapat dihimpun

- 6) Pentingnya arti ekspor dalam struktur perekonomian Indonesia terutama dapat dilihat dari
 - A. RAPBN
 - B. neraca pembayaran
 - C. struktur ekspor
 - D. neraca perdagangan

- 7) Struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat dari komponen-komponen....
 - A. lapangan kerja penduduk
 - B. sumber penghasilan penduduk
 - C. sumbangan setiap sektor
 - D. semuanya benar

- 8) Perubahan struktur perekonomian Indonesia dari pertanian ke industri yang paling menonjol adalah pada
 - A. Repelita I
 - B. Repelita II
 - C. Repelita III
 - D. Repelita IV

- 9) Ada 3 jenjang analisis dalam perubahan struktur pertanian tradisional ke industri. Pada jenjang manakah Indonesia saat ini?
 - A. Jenjang I
 - B. Jenjang II
 - C. Jenjang III
 - D. Jenjang I Dan II

- 10) Perubahan struktur ekonomi Indonesia saat ini cenderung menimbulkan kontraksi terutama hasil sektor
 - A. pertanian
 - B. industri
 - C. jasa keuangan
 - D. konstruksi dan bangunan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C.
- 2) C.
- 3) B.
- 4) D.
- 5) D.
- 6) D.
- 7) A.
- 8) C.
- 9) D.
- 10) B.

Tes Formatif 2

- 1) A.
- 2) B.
- 3) B.
- 4) C.
- 5) C.
- 6) C.
- 7) D.
- 8) D.
- 9) D.
- 10) A.

Daftar Pustaka

- Bapenas. (2003). *Perekonomian Indonesia Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan*.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama
- Rahardjo, Dawar. (1997). *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tirta Wacana Yogya.
- Adenan, Djamarie. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Larasari, Endang. (1986). *Keuangan Negara*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Hasibuan, Malayu. (1987). *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Armico
- Todaro P. Michael. (1985). *Ilmu Ekonomi Bagi Negara-negara Sedang Berkembang. Suatu Pengantar Ekonomi Dasar. Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan*. Terjemahan. Sinaulan. Jakarta: Akademi Presindo
- Jhingan, (1988). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Erlangga.